

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah satu kesatuan dimana berbentuk Republik dalam sistem kedaulatannya, dimana para pejabat mulai dari Eksekutif sampai Legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah Dan Presiden dipilih langsung oleh rakyat (Amila, 2023). Indonesia sendiri terbagi atas 17.380 pulau, sering pula disebut sebagai negara kepulauan karena terbentangya kepulauan di Indonesia yang terbagi mulai dari Sabang hingga Merauke (Soemarmi & Diamantina, 2019) . Oleh karena itu, dari luas wilayahnya yang cukup besar sebanding dengan banyaknya populasi yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia, Angka persebaran hasil sensus penduduk pada tahun 2023 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, menunjukkan bahwa Indonesia menduduki negara dengan jumlah penduduk 278,6 juta jiwa (Hasil Penduduk 2023, 2023).

Secara umum, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berperan sebagai penopang jantung pemerintahan dan perekonomian Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta sebagai IbuKota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Santoso, 2020). Saat ini, muncul berbagai isu terkait wacana pemindahan pusat pemerintahan Ibu Kota Negara yang dipindahkan dari Jakarta ke wilayah lain (Taufiq, 2020). Pada era kolonial digambarkan bahwa wilayah Jakarta idealnya hanya dihuni untuk 600 jiwa. Namun demikian, saat ini jumlah populasi Jakarta meningkat secara pesat hingga sekitar 10 juta penduduk pada saat aktivitas ekonomi berjalan. Tidak heran, dengan kepadatan penduduk Jakarta yang terjadi muncul berbagai tantangan dalam konteks perkotaan seperti kemacetan, hingga memiliki berbagai risiko bencana salah satunya banjir yang menjadi permasalahan utama di Jakarta (Taryana, 2022)

Pencetusan pertama terkait adanya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) diusulkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957, Presiden Soekarno memilih daerah Palangkaraya karena daerah tersebut letaknya ditengah pada kepulauan Indonesia dan memiliki luas wilayahnya cukup luas (Hindiawati, 2024). Ide Presiden Soekarno yang merancang IKN sebagai pembangunan modern ini nantinya ditujukan kepada dunia bahwasannya Indonesia dapat mewujudkan pembangunan Ibu Kota Negara yang terencana dengan baik. Pada waktu tersebut Presiden Soekarno masih menetapkan Jakarta sebagai pusat Ibu Kota Negara pada tanggal 22 Juni 1964 yang berlandaskan kepada UU No 10 Tahun 1964. Pada masa orde baru, muncul isu terkait wacana pemindahan Ibu Kota Negara yang akan dipindahkan di Jonggol, Bogor, Jawa Barat yang nantinya akan dijadikan sebagai pusat Ibu Kota Negara baru. Pasca kepemimpinan presiden ke 7 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau sering disebut SBY, adanya wacana yang diusulkan pada masa tersebut gagal dilaksanakan. Sampai pada masa Presiden Joko Widodo memutuskan bahwasannya perpindahan pusat pemerintahan Ibu Kota Negara nantinya akan dipindahkan keluar dari daerah Pulau Jawa tepatnya didaerah Kalimantan Timur pada tanggal 29 April 2019, yang dimana telah tertuang pada RPJMN 2020-2024. Pemindahan pusat Ibu Kota Negara IKN yang akan dipindahkan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Provinsi Kalimantan Timur. Adapun penilaian kriteria pemindahan pusat Ibu Kota Negara yang dipindahkan di wilayah tersebut karena aksesibilitas yang memadai, wilayah IKN sendiri nantinya dekat dengan dua kota besar yang ada di wilayah Kalimantan Timur yaitu Balikpapan dan Samarinda, Potensi adanya konflik cukup rendah, Infrastruktur sarana dan prasarana pendukung besar tersedia (Saraswati & Adi, 2022).

Perpindahan Ibu Kota Negara pada wilayah Kalimantan Timur memiliki berbagai faktor seperti halnya dari segi sosial, budaya, ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan keamanan, lingkungan hingga sampai dengan timbulnya potensi bencana alam yang menjadi pertimbangan tersendiri untuk pentingnya Ibu Kota

Negara dipindahkan dari DKI Jakarta menuju wilayah Provinsi Kalimantan Timur (FISIP UI, 2020). Faktor lain karena adanya kepadatan pada jumlah penduduk yang berada di wilayah Pulau Jawa, pada akhirnya menyebabkan kesenjangan di berbagai aspek seperti kesenjangan antarwilayah yang menyebabkan perbedaan dari segi pembangunan fasilitas sarana dan prasarana antara daerah yang menjadi titik tumpuan atau pusat dan daerah sub yang bukan menjadi titik tumpuan atau titik pusat, kesenjangan antar sektor ekonomi karena titik perekonomian yang terpusat di Pulau Jawa, kesenjangan pada sektor pendidikan dimana pendidikan sangatlah berpengaruh didalam pembangunan khususnya pada sektor sumber daya manusia. Kesenjangan pada segi sosial dan ekonomi menunjukkan adanya jumlah penduduk yang terkonsentrasi pada Pulau Jawa, Menurut data dari BPS Sulut (2024) menunjukkan jumlah penduduk yang berada pada Pulau Jawa ditahun 2024 berada diangka 156.927,8 juta jiwa atau sekitar 60% penduduk Indonesia yang terpusat di Pulau Jawa. Hal itu yang mendorong adanya rencana pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari DKI Jakarta menuju wilayah Otorita Ibu Kota Nusantara tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur. Kepadatan yang terjadi pada Pulau Jawa menyebabkan adanya pemusatan dari segi pembangunan dan kemajuan dari berbagai lini sektor akan tetapi sebaliknya bagi wilayah luar Pulau Jawa yang mengalami ketertinggalan (Najilatil Mazda, 2022).

Pemerintah menetapkan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke pulau Kalimantan. Tepatnya di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur (Arfani et al., 2023). Wilayah Ibu Kota Nusantara didiami lima suku yaitu suku dayak, suku balik, suku kutai, suku banjar, dan suku paser. Dengan proporsi pendatang sebesar 73,2% (Putra et al., 2024). Adanya pembangunan yang kian hari terus digarap di wilayah Kalimantan Timur juga menarik kepindahan suku bugis, dan berbagai entitas suku lainnya yang berakulturasi dimana melakukan kawin silang antar suku didalamnya, termasuk dengan suku asli paser, dan berbagai suku dayak lainnya (DPR RI dalam jurnal Putra et al., 2024)

IKN dirancang sebagai mesin perekonomian baru di daerah lain yang sebelumnya difokuskan di pulau Jawa (Simanjuntak, 2024). Dengan adanya pembangunan IKN, maka diharapkan dapat lebih meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan menyeluruh. Penetapan rencana pembangunan IKN diatur didalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Firnaherera & Lazuardi, 2022). Perumusan Undang-Undang IKN ditetapkan DPR pada 18 Januari 2022 dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah resmi menandatangani UU IKN pada tanggal 15 Februari 2022 (Oktavia, 2024). Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara ini menjadi tiang utama bagi landasan terhadap turunan-turunan peraturan dibawahnya yang terkait tentang adanya Ibu Kota Negara.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo dalam jurnal Kartono & Nurcholis, (2016) bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Teori pembangunan menurut Siagian (2001) pembangunan ialah merupakan rangkaian dari sebuah usaha pertumbuhan dan perubahan yang tersusun secara terencana yang dimana dilakukan secara sadar oleh negara itu sendiri yang memiliki tujuan untuk menuju modernitas dalam rangka pembinaan untuk bangsa. Dalam penelitian ini menggunakan turunan dari teori pembangunan tepatnya, teori kutub pertumbuhan (*growth pole* atau *poledecroissance*). Teori ini pertama kali diungkapkan oleh pencetusnya atau pemikirnya yaitu Francois Perroux, yang dimana seorang ahli ekonomi yang berasal dari Prancis. Mengikuti pendapat Perroux, Hirschman mengatakan bahwa untuk mencapai tingkat pendapatan yang lebih tinggi, terdapat keharusan untuk membangun sebuah atau beberapa buah pusat kekuatan ekonomi dalam wilayah suatu negara atau yang disebut sebagai pusat-pusat pertumbuhan (*growth point* atau *growth pole*) (Dr. Ridwan, SE, 2015).

Menurut Perroux sendiri terdapat beberapa elemen yang dimana sangat menentukan dalam adanya konsep kutub pertumbuhan, yaitu pengaruh yang tidak dapat dielakkan dari suatu unit ekonomi terhadap unit ekonomi lainnya. Pengaruh tersebut semata-mata adalah dominasi ekonomi yang terlepas dari pengaruh tata ruang geografis dan dimensi tata ruang (*space and space dimension*). Dalam pandangan Perroux sendiri lebih menekankan terhadap aspek pemusatan pertumbuhan. Ada ciri dasar yang dapat disebutkan antara lain :

1. Industri pendorong harus memiliki kapasitas besar, berkembang pesat, dan memiliki hubungan yang kuat dengan sektor lainnya agar dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara luas.

Peranan kutub pertumbuhan dalam pengembangan wilayah adalah sebagai penggerak utama atau lokomotif pertumbuhan, yang selanjutnya menyebarkan hasil-hasil pembangunan dan dampak pertumbuhan ke wilayah pengaruh. Dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah Kalimantan Timur. Keterkaitan pembangunan dengan teori yang disampaikan bahwasannya Pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat inti yang nantinya dapat menjadi penggerak dari segi perekonomian, hingga pemerintahan di wilayah sekitar penyanggah seperti Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Balikpapan, dan Samarinda.

Aspek paling penting dalam proses pemindahan IKN yaitu Sumber Daya Manusia, SDM merupakan hal paling wajib yang di persiapkan dalam menyambut pemindahan IKN (Muhlashin, 2023). Membangun IKN dengan pendekatan pembangunan fisik terbilang berat, hal ini terdapat beberapa faktor yaitu selain kebutuhan sumber dana yang cukup besar, terdapat juga permasalahan yang akan muncul dikemudian hari jika tidak dibarengi dengan pembangunan sumber daya manusia. Ada 170 ribu warga Penajam Paser Utara yang harus menghadapi perubahan-perubahan besar, dan berani membayangkan perubahan besar yang akan terjadi ketika pemindahan IKN sudah terlaksana (Muhlashin, 2023).

Pemerintah Indonesia memiliki visi 2045 sebagai Indonesia Emas (Nasrul, 2023). Oleh karena itu, diperlukan transformasi ekonomi guna mencapai target

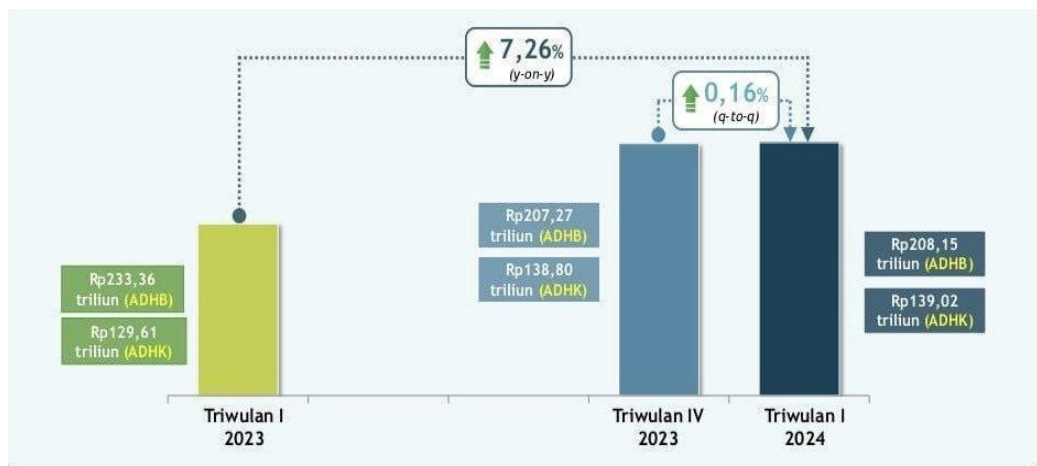
visi itu, Dalam konteks perindustrian dapat melakukan transformasi ekonomi dengan cara memanfaatkan SDM (Sumber daya manusia), infrastruktur, penegakan peraturan, dan reformasi birokrasi yang dimulai pada tahun 2020-an dan akan berlanjut hingga tahun 2024-an, pentingnya IKN yang bisa mendukung dan menghambat transformasi ekonomi (Arfani et al., 2023). Menurut (Arfani et al., 2023), IKN dapat memajukan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata termasuk yang ada di Kawasan Timur Indonesia. Di Jakarta merupakan pusat sentral segalanya, perputaran uang yang sampai di 70 % membuat tidak meratanya pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia, kondisi yang seperti ini yang membuat keadaan menjadi kurang baik dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia yang memiliki harapan ekonomi berkelanjutan, tidak memanfaatkan potensi daerah secara optimal, tidak mendukung keadilan antara daerah dan rentan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

Pemerintah juga perlu memikirkan risiko-risiko yang akan terjadi, selain potensi ekonomi yang akan merata, pemindahan IKN juga memiliki risiko menurut penelitian (Silalahi, 2019) bahwa dalam pembiayaan dari kebutuhan pemindahan IKN, BAPPENAS perlu adanya perhitungan bahwa akan ada keperluan sebesar Rp. 466 triliun. Skenario dalam kebutuhan pembiayaan sangat bergantung pada fungsi pemerintah dan jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang akan di pindah tugaskan (Bappenas, 26 Juni 2019). Penjelasan terkait rincian biaya yang akan di butuhkan meliputi pada pembangunan fungsi utama, fungsi pendukung, fungsi penunjang, dan pengadaan lahan. Berikut dua skenario dalam kebutuhan pembiayaan :

Tabel 1 Kebutuhan Pembiayaan dari Pembangunan IKN Baru

No	Kebutuhan Infrastruktur	Skenario I (Rp triliun)	Skenario II (Rp triliun)
1	Fungsi Utama: Gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif	32,7	20
2	Fungsi Pendukung: Gedung dan rumah ASN/Polri/TNI, fasilitas pendidikan dan kesehatan	265,1	182,2
3	Fungsi Penunjang: fasilitas sarana dan prasarana	160,2	114,8
4	Kebutuhan Pengadaan Lahan	8	6
Total		466	323

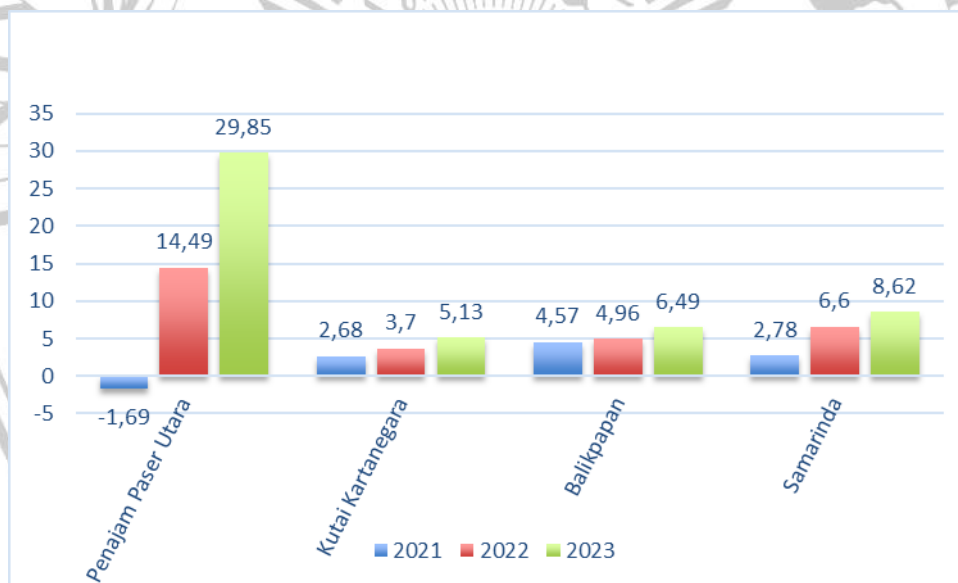
Selain adanya permasalahan dalam pembiayaan yang besar, disebutkan juga adanya permasalahan lain yang disebabkan dari salah satu faktor yang menyangkut budaya, Kalimantan pertikaian antara adat yang membuat konflik sosial dengan adanya pembentukan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Salah satu kegiatan yang dapat memicu permasalahan yaitu migrasi, dengan adanya migrasi ini masyarakat lokal yang akan berinteraksi dengan pendatang, dengan interaksi multikultural yang memiliki banyak perbedaan seperti fisik, adat istiadat, dan kebiasaan yang mengakibatkan rentannya konflik terjadi. Menurut pernyataan dari (Putra et al., 2024) bahwa perbedaan budaya di Indonesia yang sebagian besar dapat menjadikan konflik destruktif yang menimbulkan bentrokan antar suku, agama, ras ataupun antar golongan. Setiap kubu atau kelompok masyarakat memiliki ciri khas atau identitas sosial yang berbeda-beda yang dapat memunculkan perseteruan antara masyarakat lokal dengan pendatang, hal ini disebabkan karena timbulnya rasa terancam yang seharusnya tidak akan terjadi. Rasa hak kepemilikan tempat adat masyarakat Kalimantan Timur yang khawatir akan hilang, keawatiran dalam hal ini terjadi karena tekanan dalam persaingan dalam pemindahan ibu kota negara yang diikuti laju migrasi. Sedangkan kualitas pendidikan tinggi yang dimiliki oleh masyarakat DKI Jakarta dengan Kalimantan yang berbeda jauh sehingga sulitnya persaingan yang akan terjadi.



Gambar 1 Tingkat Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur

Data pertumbuhan perekonomian diwilayah provinsi Kalimantan Timur yang menunjukkan triwulan I 2023 sampai triwulan I 2024 dimana memperlihatkan kecondongan tren positif dimana berdasarkan data yang diuraikan diatas dapat mengetahui bahwa setiap triwulan didalam periode tersebut memberikan catatan pertumbuhan perekonomian, puncaknya terjadi pada triwulan I 2024 yang mencapai 7,26% (KALTIM, 2024). Dimana pada triwulan I 2023 perekonomian khususnya diwilayah provinsi Kalimantan Timur meningkat sebesar 6,15% dari pada triwulan IV 2022. Faktor adanya pertumbuhan yang pesat dimana didorong dari 2 sektor utama diwilayah tersebut seperti pertambangan dan perdagangan. Pertambangan dan penggalian merupakan sektor penyumbang terbesar sebesar 40,64% dari jumlah pertumbuhan tersebut, dimana memperlihatkan dominasi dalam sektor perekonian di Provinsi Kalimantan Timur. Sektor perdagangan memberikan kontribusi sebesar 11,74%. Pada triwulan I 2024 memasuki perkembangan perekonomian meningkat diangka 7,26%. Meski peran sektor pertambangan dan penggalian sedikit mengalami penurunan di angka 37,95% akan tetapi sektor tersebut masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi di provinsi Kalimantan Timur. Dan juga, pada sektor transportasi dan pergudangan memberikan dampak peningkatan dalam hal kontribusi sebanyak 13,49%, dimana menggambarkan sebuah lonjakan aktivitas logistik dan transportasi di Provinsi Kalimantan Timur.

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator yang dipakai dalam menentukan keberhasilan pembangunan (Safira et al., 2019). Secara menyeluruh, adanya peningkatan tren pertumbuhan perekonomian positif menggambarkan Provinsi Kalimantan Timur yang baik. Provinsi Kalimantan Timur ialah salah satu penyumbang kekayaan hasil tambang terbesar di Indonesia seperti minyak, gas alam dan batu bara (Dinarjito & Dharmazi, 2020). Adanya berbagai komoditi unggulan tersebut tidak hanya menggambarkan prestasi dari sektor komoditi unggulan di wilayah tersebut. Namun juga, memperlihatkan data peningkatan kapasitas ekonomi yang lebih luas. Pertumbuhan perekonomian yang tinggi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur ini menggambarkan sebagai growth with out development (Reynaldy alviano, ida nuraini, 2020). Adanya Pertumbuhan perekonomian memang dilaksanakan, akan tetapi tidak dengan pembangunannya yang tidak bisa dinikmati oleh sebagian masyarakat.



Grafik 1 Data Pertumbuhan PDRB Produk Domestik Regional Bruto di 4 Kabupaten/Kota dari tahun 2021-2023

Dalam data tersebut menjelaskan adanya pertumbuhan pada sektor perekonomian yang ada di 4 Kabupaten/Kota daerah penyanggah wilayah Ibu Kota Nusantara yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Data tersebut menjelaskan uraian daerah Kabupaten/Kota. Faktor utama yang cukup

berpengaruh di dalam tingkat pertumbuhan perekonomian di provinsi Kalimantan Timur harga komoditas yang seperti batu bara dan minyak bumi sangat dapat bersaing di pasar global, dan perubahan dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi pendapatan khusus daerah. Dimana pada saat harga komoditi unggulan tersebut mengalami peningkatan, dan pendapatan daerah khususnya dari sektor pertambangan dan penggalan meningkat berdampak meningkatnya aktivitas ekonomi lainnya. Dimana sebaliknya, adanya penurunan harga komoditas dapat memberikan tekanan pendapatan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain harga komoditas, adanya peningkatan investasi dimana memberikan peran penting pertumbuhan ekonomi. Investasi dibidang unggulan khususnya pertambangan, energi, dan pembangunan infrastruktur dapat memberikan dampak perekonomian yang berkelanjutan. Peningkatan investasi didalam insfrastruktur dapat meningkatkan efisiensi dibidang logistik dan transportasi seperti yang terlihat dari perkembangan kontribusi disektor transportasi pada triwulan I 2024. Investasi yang masuk menggambarkan keyakinan investor terhadap berbagai prospek perkembangan perekonomian daerah dimana dapat lebih menarik banyak penanaman modal yang masuk dan berbagai proyek diwilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur contohnya jembatan akses jalan dan pelabuhan telah memberikan aksesibilitas konektivitas dimana dapat membuka peluang ekonomi baru bagi penduduk di daerah tersebut (Kementrian, 2012). Apalagi dengan adanya program pemindahan ibukota negara diwilayah provinsi Kalimantan Timur yang akan memberikan dampak positif karena dengan adanya pemindahan ibukota negara baru dapat menciptakan pemerataan bagi penanganan infrastruktur terlebih pembangunan terdahulu selalu memfokuskan diwilayah jawa karena sebagai pusat sentral perekonomian. Infrastruktur yang nantinya tersedia dapat mempermudah adanya distribusi jasa maupun barang menekan biaya transpostasi dan memperkuat perekonomian yang ada diwilayah Kalimantan Timur. Berbagai program yang dicanangkan oleh pemerintah dimana juga berpengaruh penting didalam penurunan tingkat laju

kemiskinan. Seperti, program keluarga harapan, program sembako rakyat, dan berbagai macam susunan program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk membantu membangkitkan pendapatan dan membantu mensejahterakan masyarakat kurang mampu. Berbagai program tersebut mengadakan bentuk bantuannya seperti (BLT) bantuan langsung tunai, akses terhadap kebutuhan dasar dan penunangan yang diperuntukkan untuk usaha mikro kecil.

Pemindahan pusat Ibu Kota Negara baru di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, menimbulkan dampak tersendiri atas adanya pemindahan pusat pemerintahan tersebut mendapatkan nilai plus atau dampak positif seperti adanya ketersediaan lapangan pekerjaan karena meningkatnya angka keterbukaan pembangunan baru di wilayah Provinsi Kalimantan Timur khususnya di 4 wilayah kabupaten/kota penyanggah atau sektor lapangan usaha lain yang beriringan yang berdampak dengan adanya pemindahan pusat pemerintahan, Adanya perputaran perekonomian baru yang diakibatkan karena adanya pemindahan tersebut seperti pada sektor jasa travel maupun hotel yang dimanfaatkan masyarakat lokal ditambah nantinya wilayah IKN akan menjadi jalur perdagangan ekonomi baru dengan menggunakan program Superhub three city, Dengan adanya jumlah lapangan usaha dan lapangan kerja yang terbuka di wilayah tersebut mengakibatkan turunnya jumlah penduduk miskin, garis kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur khususnya 4 wilayah kabupaten/kota Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Balikpapan, dan Samarinda (Pribadi & Utomo, 2021). Pembangunan Ibu Kota Negara yang terletak di wilayah Provinsi Kalimantan Timur menarik minat peneliti untuk melihat bagaimana besarnya pengaruh adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN terhadap kondisi daerah sekitar. Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang diharapkan dapat pemeratakan dari segi perekonomian dan pembangunan pada daerah timur.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Dampak Pembangunan Ibu Kota Nusantara Terhadap Pembangunan Kabupaten/Kota Di Wilayah Sekitar.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Analisis Dampak Pembangunan Ibu Kota Nusantara Terhadap Pembangunan Kabupaten/Kota Di Wilayah Sekitar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur dalam bidang dampak pembangunan Ibu Kota Negara, khususnya lingkup ruang bagian Kalimantan II yang menaungi tentang adanya pembangunan di wilayah Ibu Kota Negara. Penelitian ini akan memberikan wawasan, terkait bagaimana perkembangan adanya pembangunan IKN khususnya bagi daerah sekitar. Selain itu, penelitian ini bermanfaat bagi adanya pengembangan di lingkup ruang studi Ilmu Pemerintahan khususnya Ilmu Pemerintahan Muhammadiyah Malang.

2. Manfaat praktis bagi penulis dari penelitian ini adalah dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung terkait strategi yang diselenggarakan. Manfaat praktis bagi pemerintah adalah diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menangani sebuah permasalahan yang serupa nantinya.

1.5 Definisi Konseptual

Definisi Konseptual adalah upaya yang dilakukan peneliti untuk memberikan makna (definisi) konsep yang digunakan dalam penelitian yang nantinya untuk diteliti, diukur, dan mencari datanya. Dengan demikian, adanya uraian bahasan yang sedang dikaji dalam penelitian ini, dari sisi penulis ingin memberikan gambaran sebuah konsep yang sedang dikaji nantinya agar memudahkan pembaca dalam memahami isi dan maksud dari penelitian yang sedang dikaji ini:

1.5.1 Kutub Pertumbuhan (Growth pole)

Menurut Perroux terdapat elemen yang sangat menentukan dalam konsep kutub pertumbuhan, yaitu pengaruh yang tidak dapat dielakkan dari suatu unit ekonomi terhadap unit-unit ekonomi lainnya. Nampaknya, Perroux lebih menekankan pada aspek pemusatan pertumbuhan. Meskipun ada beberapa perbedaan penekanan arti industri pendorong, akan tetapi ada ciri dasarnya yang dapat disebutkan, yaitu sebagai berikut:

1. Industri pendorong harus memiliki kapasitas besar, berkembang pesat, dan memiliki hubungan kuat dengan sektor lainnya agar dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara luas.

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel ialah suatu objek atribut maupun nilai dari orang, atau kegiatan dimana mempunyai variasi tertentu yang sudah ditetapkan oleh peneliti yang sebagai penulis nantinya untuk dipelajari dan kemudian nantinya akan ditarik kesimpulannya.

- a. Industri pendorong yang memberikan dampak positif.

Melihat suatu industri yang nantinya dapat mendorong pada segi kemajuan ekonomi dimana industri ini memiliki ukuran yang besar, tumbuh dengan cepat yang berhubungan dengan sektor lain berdampak positif pada perekonomian.

- b. Dampak sosial dan Demografi

Melihat pada perubahan pada jumlah penduduk aktif migrasi, dan perubahan pada segi sosial dan budaya.

- c. Dampak ekonomi

Melihat bagaimana pembangunan IKN mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sektor apa yang mengalami peningkatan dan penurunan, apakah

ada perubahan lapangan pekerjaan dalam dan provinsi, peningkatan lapangan pekerjaan, sasaran terkait ekonomi lokal.

d. Dampak Lingkungan

Pembangunan IKN terhadap ekosistem dan keberlanjutan SDA, langkah mitigasi untuk mengurangi dampak negatif.

e. Kebijakan, kab dan tata kelola

Adanya pembangunan IKN ini Kabupaten/Pemda dalam merespon IKN, Sejauh mana Koordinasi Pusat dan Daerah, Apa Ada Kabupaten khusus agar perkembangan IKN berjalan seimbang.

1.7 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan dimana merupakan bagian aspek terpenting bagi peneliti dimana berupa cara pola berfikir peneliti dan memiliki tujuan yang terstruktur agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Dengan demikian, diperlukannya suatu metode yang mampu memecahkan atau membantu peneliti agar mendapatkan data yang valid dan aktual yang berlandaskan data lapangan yang terkait analisis dampak pembangunan IKN terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota disekitar ibu kota nusantara.

1.7.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian analisis dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara Terhadap Pembangunan Kabupaten/Kota Di Wilayah Sekitar. Pada ini penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami gambaran secara sistematis dan juga akurat tentang fakta yang dimana terkait pembahasan yang sedang dikaji.

1.7.2 Sumber Data

Sumber data adalah suatu subyek dari asal data tersebut didapatkan. Sumber data tersebut penting diketahui untuk nantinya

bertujuan menunjang jalannya penelitian dan menjamin keberhasilan penelitian yang sedang dikaji. Dalam penelitian analisis dampak pembangunan IKN terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota disekitar ibu kota nusantara.

1) Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang dimana diperoleh secara langsung dari narasumber yang memahami dan terpercaya terkait topik yang sedang diangkat melalui wawancara. Pada prosesnya melakukan wawancara dengan Bapak Anang Budi Gunawan selaku Koordinator Regional II, Kalimantan II. Dimana Bapak Anang Budi Gunawan sendiri mengetahui akan topik yang sedang saya kaji. Didalam proses wawancara yang peneliti lakukan, peneliti memberikan 7 sub pertanyaan utama dengan setiap sub pertanyaan berisikan 5 pertanyaan. Proses wawancara tersebut diambil pada tanggal 30 September 2024, dan 15 Oktober 2024 di Direktorat Regional II, Kalimantan II, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder dapat didapatkan melalui dokumen resmi pemerintahan yang tersedia, kumpulan rangkuman, jurnal akademik, buku artikel, dan berbagai bentuk publikasi lainnya. Sumber data sekunder sendiri diperoleh oleh peneliti dari Bapak Anang Budi Gunawan selaku Koordinator Regional II, data tersebut seperti halnya UU No 3 tahun 2022 yang menjadi bahan acuan dalam peneliti melihat arah pembangunan Ibu Kota Nusantara, rangkuman bahan terkait Superhub three city dimana data tersebut diperoleh berupa paparan berbentuk powerpoint yang didapatkan dari Koordinator Regional II, Masterplan kota Balikpapan dan Samarinda, dan data pendukung lainnya diperoleh dari website Simregnas Bappenas, dan BPS.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan sebuah teknik tahapan dalam sebuah penelitian, memiliki tujuan yaitu untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data yang tersedia di lapangan maupun di pusat pemerintahan.

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dimana melakukan interaksi antar individu atau percakapan antar individu yang memiliki tujuan untuk mengetahui maksud tertentu. Didalam proses wawancara ini peneliti melakukan proses wawancara bersama Bapak Anang Budi Gunawan selaku Koordinator Regional II, Kalimantan II Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Didalam proses wawancara tersebut dilakukan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, dengan memberikan 7 sub pertanyaan dimana pertanyaan tersebut berisikan pertama terkait regulasi, kedua pengembangan IKN, ketiga Mobilitas, keempat Pertumbuhan Ekonomi IKN, kelima Angka kemiskinan, Keenam Dampak pembangunan IKN, kedelapan tentang hambatan. Proses wawancara tersebut dilakukan diwaktu yang berbeda pada tanggal 30 September 2024, dan 15 Oktober 2024. Adanya proses wawancara tersebut berguna untuk menggali data dan memperkuat nantinya gambaran argumen terkait Ibu Kota Nusantara. berkaitan tentang topik yang sedang diangkat dan dikaji.

2. Observasi

Observasi merupakan sebuah tahapan proses yang dimana melakukan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung yang sifatnya akurat dan terstruktur. Di dalam penelitian ini,

peneliti melakukan proses penelitian di Direktorat Regional II Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional guna untuk mendapatkan data yang terkait pembahasan yang sedang diangkat termasuk melalui data-data bersumber dari Badan Pusat Statistik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah metode yang kedua cukup mudah karena mencari data bisa dengan berbagai hal seperti mencari catatan, transkrip, buku, notulen, rapat, dan lain sebagainya. Peneliti sebagai pihak terkait menggunakan metode ini, nantinya digunakan untuk alat pengumpulan data dari sumber bahan tertulis maupun non tertulis mulai dari pencarian perangkat yang lebih relevan dengan penelitiannya.

1.7.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Peneliti melakukan proses penelitian ini dikarenakan Bappenas memiliki peran dalam proses awal perencanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara serta koordinasi perencanaan di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat sekaligus memastikan sinergi dengan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

1.7.5 Subjek Penelitian

Subjek penelitian di dalam penelitian ini merupakan dari narasumber yang nantinya dapat memberikan penjelasan dan memberikan sebuah gambaran data terkait informasi yang sedang diteliti. Di dalam subjek penelitian ini, diantaranya sebagai berikut staf:

Direktorat Regional II, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Analisis data ialah merupakan sebuah proses dimana pengolahan data yang telah disusun dan didapatkan nantinya untuk menemukan tujuan dari penelitian yang sedang dilakukan, setelah adanya proses analisis data, peneliti sendiri mendapatkan sebuah gambaran informasi yang dimana berguna untuk membantu proses pengambilan keputusan. Menurut (Cresswell, 2014) analisis data kualitatif dilakukan dengan beberapa tahapan pada tahap awal reduksi data, penyajian data, dan terakhir proses penarikan kesimpulan.

A. Reduksi data

Reduksi data digunakan untuk proses pemilihan, penyederhanaan, pemetaan, memindahkan data mentah dari lapangan. Dalam hal ini, reduksi data dapat memberikan sebuah gambaran yang cukup akurat, dengan adanya hal tersebut dapat memudahkan soal pengumpulan data tambahan lebih bagi peneliti. Data bersumber dari Simregnas Bappenas seperti data indeks pembangunan manusia, Badan Pusat Statistika seperti data kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, lapangan usaha, komoditas unggulan, data terkait regulasi yang mengatur undang-undang Ibu Kota Negara. Berbagai data tersebut seperti contohnya data IPM yang berasal dari simregnas Bappenas yang berupa data mentah diolah di excel untuk nantinya dilihat statistik berbentuk diagram yang berguna untuk memudahkan proses analisis.

B. Penyajian data

Data-data yang telah diolah dari mentah dan nantinya dipaparkan untuk memudahkan proses analisis seperti data kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, lapangan usaha, sumber pertumbuhan. Dimana data-data tersebut dipaparkan dalam bentuk diagram grafik yang bertujuan untuk menganalisis atau membaca hasil tersebut.

C. Menarik kesimpulan

Pada tahapan ini ialah merupakan tahapan teknis analisis data paling terakhir. Didalam tahapan ini, kesimpulan dilakukan untuk melihat, menilai gambaran reduksi data apakah hal tersebut masih berkesinambungan dengan tujuan analisis yang ingin di capai. Pada bagian ini sangatlah membantu dalam peneliti menganalisis guna untuk menemukan keterkaitan hubungan, persamaan, maupun perbedaan, dan nantinya dari hal tersebut dapat menarik kesimpulan yang nantinya akan menjawab permasalahan atau kajian yang sedang diteliti guna menjawab penelitian tersebut.

